

**HASIL EVALUASI *OUTLINE* SKRIPSI FH UEU, 30 OKTOBER 2013
(A=DITERIMA;B=DITERIMA DENGAN CATATAN;C=DITOLAK)**

No	NAMA	N.I.M	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	Orisinalitas	Kelayakan	Keterangan	Pembimbing
1	Anisa Lestari	2010-41-030	Aspek Hukum Terhadap Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia	1.Apa Akibat Hukum Akta Fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal eksekusi Objek Jaminan? 2.Bagaimana Kekuatan Akta Fidusia yang telah di daftarkan terhadap Eksekusi Objek Jaminan?	✓	B	Redaksional RM Diperbaiki	I Gede Hartadi Kurniawan
2.	Eni Wulandari	2010-41-014	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan : Nomor 1669/Pid.B/2012/PN.Tng)	1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Khususnya Dalam Putusan Nomor.1669/Pid.B/2012/PN. Tng 2. Bagaimana Penguraian Unsur Pasal Dalam Penerapan Pasal 378 KUHP (Penipuan)?	✓	B	Redaksional RM Diperbaiki	Nugraha Abdulkadir
3.	Jarim	2010-41-094	Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Di PT.EDS Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	1. Kebiasaan Pola Kerja Yang dilakukan Para Pekerja Di PT.EDS yang berdampak terhadap kesehatan 2.Faktor-faktor apa saja yang dapat merubah kesehatan para pekerja lajang menjadi tidak lajang lagi? 3.Perjanjian Kerja Bersama (PKB 2009/2011) Di PT.EDS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 Tentang JAMSOSTEK, dan PP Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial	✓	B	Harus Bersifat Empiris & RM Diperbaiki	Agus Suprayogi

				Tenaga Kerja 4.Dampak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap Peningkatan Jaminan Kesehatan Di PT.EDS bagi Para Pekerja				
4.	Achmad Saifudin F	2010-41-099	Analisa Terhadap Kewenangan Mahkamah Kontitusi Dalam Mengabulkan Permohonan Melebihi Apa Yang Diminta Pemohon (Studi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 48/PUU-IX/2011)	1. Bagaimanakah Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengabulkan Permohonan Melebihi apa yang diminta oleh Pemohon Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahakamah Konstitusi Pasal 45A dan Pasal 57 Ayat (2a) huruf a dan c terhadap putusan-putusan berikutnya?	-	C	Sudah Ada Yang Buat	-
5.	Herrera Celine Guo	2010-41-046	Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan Dalam Mengatasi Kredit Macet	1. Bagaimana Pengaturan Tentang Eksekutorial Sertipikat Hak Tanggung DALAM Mengatasi Kredit Macet Pada Sistem Peraturan Hukum Di Indonesia? 2. Terhadap Kondisi tersebut, tindakan-tindakan apa saia yang perlu dilakukan oleh manajemen Bank terkait sesuai pasal-pasal yang tercantum dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan serta Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat	✓	B	Redaksional RM Diperbaiki	Tomy Prihananto

				dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah?				
6.	Devi Selviana	2010-41-071	Jual Beli Dan Transplantasi Organ Tuguh Manusia Menurut Hukum Di Indonesia	1. Apakah Putusan yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 sudah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut? 2. Bagaimana implikasi dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 terhadap proses penyelenggaraan dan pejabat penyelenggara Pemilihan Umum di Jawa Timur?	✓	B	Harus Ada Kasus Baru (Jagan Kasus Bapak Bahasim)	Anatomi Muliawan
7.	Yelinika Ardana Reswari	2010-41-066	Analisis Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VII/2013)	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI? 2. Apakah Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI telah mencerminkan keadilan dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?	✓	B	RM Direvisi	Nugraha Abdulkadir
8.	Sodikin	2009-41-194	Implikasi Rintisan Sekolah Bebas Internasional Didasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Bagaimanakah Implikasi Rintisan Sekolah Berbasis Internasional Didasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia?	✓	B	Redaksional RM Diperbaiki	Wasis Susetio

(Studi Kasus Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
5/PUU-X/2012)

2. Bagaimanakah Implikasi
Undang-Undang Sisdiknas
Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 50
Ayat(3) setelah terbitnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
5/PUU-X/2012 TENTANG
Rintisan Sekolah Berbasis
Internasional?